

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
FUNDAMENTAL TAHUN KE I**



**JUDUL**

**KAJIAN KOMPREHENSIF UNIT PENGELOLA KEUANGAN DESA (UPKD)  
DAN PROBABILITAS KEGAGALAN DALAM PENGELOLAANNYA  
PASCA BENGKULU REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT (BRDP)  
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**Disusun Oleh**

**Ir. Nusril, MM  
Indra Cahyadinata, SP, M.Si  
Ir. Bambang Sumantri, MS**

**DIBIYAI OLEH DIPA UNIB NO. 024.0/023-04.2/VIII/2009  
BERDASARKAN SURAT KONTRAK  
NOMOR : 2804/H30.10.06.01/HK/2009 TANGGAL 01 APRIL 2009**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
NOVEMBER 2009**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR**

- 1 Judul : KAJIAN KOMPREHENSIF UNIT PENGELOLA KEUANGAN DESA (UPKD) DAN PROBABILITAS KEGAGALAN DALAM PENGELOLAANNYA PASCA BENGKULU REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT (BRDP) DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
- 2 Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Ir. NUSRIL, MM
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 131 624 792
- d. Pangkat / Golongan : Pembina / IV a
- e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- f. Fakultas/Jurusan : PERTANIAN / SOSIAL EKONOMI
- g. Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu
- h. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu
- 3 Jumlah Tim Peneliti : 3 orang
- 4 Lokasi Penelitian : KABUPATEN BENGKULU UTARA
- 5 Kerjasama dengan Institusi Lain : -
- 6 Masa Penelitian : 2 April - 3 November 2009
- 7 Biaya yang di Perlukan : Rp 37.500.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Pertanian

Dr. Ir. YUWANA, M.Sc  
NIP. 131 627 062

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian

Drs. SARWIT SARWONO, M.Hum  
NIP. 131 601 662

Bengkulu, November 2009  
Ketua Peneliti,

Ir. NUSRIL, MM  
NIP. 131 624 792

## RINGKASAN

*UPKD selama masa BRDP telah mengalami perkembangan yang relatif baik. Sekarang, UPKD harus dapat memupuk modal sendiri dari modal yang diberikan BRDP. Artinya, UPKD harus dapat mempertahankan tingkat pengembalian anggota setinggi mungkin agar modal yang tertanam dapat terus diputar sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Hal ini berarti kondisi finansial UPKD harus tetap dipertahankan kesehatannya. Untuk itu, menjadi menarik untuk mengkaji UPKD setelah lepas dari masa proyek BRDP, termasuk probabilitas terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai pada tahun pertama ini (Tahun 2009) adalah 1) Mengetahui tingkat partisipasi anggota UPKD dan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi, 2) Mengetahui tingkat pengembalian kredit anggota UPKD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan 3) Mengetahui tingkat kesehatan UPKD selama dan pasca BRDP. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dipilih responden UPKD sebanyak 6 unit dan 180 responden nasabah UPKD. Alat analisis yang digunakan adalah tingkat partisipasi dan korelasi, persentase tingkat pengembalian, analisis regresi linier berganda dan analisis tingkat kesehatan UPKD.*

*Berdasarkan hasil penelitian, maka 1) Secara umum tingkat partisipasi anggota dalam mempertahankan keberlangsungan UPKD secara rata-rata adalah 68,45 %, yang terdiri dari partisipasi dalam pengembalian pinjaman yang masih tinggi yaitu sebesar 80,5 % dan partisipasi anggota dalam menghadiri pertemuan / rapat yang tergolong rendah yaitu hanya 56,4 %. Partisipasi dalam pengembalian pinjaman berhubungan dengan jumlah tanggungan keluarga, konsumsi rumah tangga, pendapatan dan lama menjadi nasabah UPKD. Sedangkan partisipasi dalam menghadiri pertemuan / rapat berhubungan dengan konsumsi rumah tangga, pendapatan dan lama menjadi nasabah UPKD, 2) Rata-rata tingkat pengembalian nasabah UPKD sebesar 53,15% dengan kisaran tingkat pengembalian antara 0,59 % - 100 %. Tingkat pengembalian ini dipengaruhi konsumsi rumah tangga, dimana peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp 1 per bulan akan meningkatkan persentase pengembalian sebesar 0,53 % dan pendapatan rumah tangga, dimana peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1 per bulan akan meningkatkan persentase pengembalian sebesar 0,1364 %. dan 3) Tingkat kesehatan UPKD yang pada saat BRDP berakhir berada dalam kategori sangat sehat, sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat pada saat ini berada dalam kategori tidak sehat, dan UPKD yang pada saat BRDP berakhir berada dalam kategori cukup sehat pada saat ini berada dalam kategori sangat tidak sehat. Umumnya pengelolaan UPKD masih cukup bagus dari aspek organisasi dan administrasi keuangan, tetapi tidak bagus dalam pengelolaan dana dan pinjaman.*

## DAFTAR ISI

	Hal
Ringkasan .....	i
Prakata .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Daftar Lampiran .....	vi
 Bab I. Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Luaran Penelitian .....	4
 Bab II. Tinjauan Pustaka .....	6
2.1. Gambaran Umum BRDP .....	6
2.2. Gambaran Umum UPKD .....	10
2.3. Beberapa Hasil Penelitian Tentang BRDP .....	12
2.4. Pemberdayaan Masyarakat dengan Kredit Bergulir Melalui UPKD .....	15
 Bab III. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	20
3.1. Tujuan .....	20
3.2. Manfaat Penelitian .....	20
 Bab IV. Metode Penelitian .....	23
4.1. Metode Pengumpulan Data ... ..	23
4.2. Penentuan Lokasi Penelitian .....	23
4.3. Metode Sampling .....	23
4.4. Metode Analisa Data .....	25
 Bab V. Hasil dan Pembahasan .....	32
5.1. Karakteristik Anggota UPKD .....	32
5.2. Partisipasi Anggota UPKD terhadap Keberlangsungan UPKD .....	35
5.3. Tingkat Pengembalian Kredit dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi ..	39
5.4. Analisa Tingkat Kesehatan UPKD .....	42
 Bab VI. Kesimpulan dan Saran .....	46
6.1. Kesimpulan .....	46
6.2. Saran .....	47
 Daftar Pustaka .....	48
 Lampiran .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini berbagai program dilaksanakan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sebagai upaya meningkatkan perekonomian pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui program *Bengkulu Regional Development Project* (BRDP). BRDP dimulai pada tahun 1998 yang didanai dari pinjaman IBRD-Loan 4290-IND. Pada awalnya kegiatan BRDP hanya dilaksanakan di 220 desa yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten dalam Propinsi Bengkulu. Pada tahun 2004 berkembang menjadi 350 desa binaan yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten dalam Propinsi Bengkulu. Desa-desa yang dibina seluruhnya merupakan desa yang termasuk dalam kriteria desa miskin. Perencanaan kegiatan BRDP didasarkan atas partisipasi masyarakat, oleh karena itu program ini disusun dengan mengakomodasikan kebutuhan dan permintaan masyarakat sasaran (*demand driven*). Metode ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, sehingga keberlangsungan program dapat terjamin, dengan kata lain, manfaat dapat terus dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh setelah program BRDP selesai.

Secara garis besar Program kegiatan BRDP mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu program peningkatan sarana dan prasarana desa (*Village Infrastructure Component/VIC*), adopsi teknologi pertanian pedesaan (*Village Based Technology Adoption/VBAT*), serta kegiatan usaha ekonomi produktif (*Income generating activity*). Komponen-komponen kegiatan BRDP di tingkat desa selanjutnya disebut dengan Program Kegiatan Desa (PKD) yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD). UPKD bertindak sebagai pengelola keuangan desa yang berperan paling penting dalam memberi bantuan pembiayaan bagi kegiatan desa, terutama yang menyangkut pengembangan ekonomi produktif pedesaan.

Kegiatan UPKD yang telah berjalan sekitar sembilan tahun tentunya telah mendatangkan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak ini dapat dilihat dari adanya perubahan dalam pengetahuan kewirausahaan, perubahan dalam nilai masyarakat, perubahan dalam pengambilan keputusan, perubahan dalam pemanfaatan teknologi,

perubahan dalam kualitas lingkungan hidup, perubahan dalam penyerapan tenaga kerja dan perubahan dalam partisipasi masyarakat. Seluruh perubahan ini terjadi sebagai akibat adanya investasi yang ditanamkan di perdesaan melalui proyek BRDP.

UPKD selama masa BRDP telah mengalami perkembangan yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat pengembalian anggota yang setiap bulannya mencapai 87,5 %. Angka ini juga menggambarkan tingkat partisipasi anggota dalam berusaha untuk mempertahankan keberadaan UPKD sebagai salah satu sumber modal di pedesaan. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Bengkulu yang memiliki lebih banyak UPKD di bandingkan dengan Kabupaten lainnya di dalam Propinsi Bengkulu. Data selengkapnya tentang penyebaran UPKD di Propinsi Bengkulu dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penyebaran Jumlah UPKD dan Anggota di Setiap Kabupaten dalam Propinsi Bengkulu Pada Masa BRDP

Kabupaten	Jumlah			
	UPKD (Unit)	Nasabah (orang)		
		Laki	Wanita	Jumlah
Bengkulu Utara	108	17.819	6.523	24.352
Mukomuko	25	6.244	1.883	8.127
Lebong	28	4.550	1.771	6.321
Kepahiang	33	7.765	3.014	10.779
Rejang Lebong	53	9.397	3.762	13.159
Bengkulu Selatan	38	4.181	856	5.037
Seluma	43	8.610	1.764	10.374
Kaur	42	4.874	1.121	5.995
<b>Total</b>	<b>370</b>	<b>63.440</b>	<b>20.704</b>	<b>84.144</b>

Keadaan UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara jika ditinjau dari tingkat kesehatan keuangan, partisipasi masyarakat serta tingkat pendapatan anggotanya sangat beragam. Keragaman ini dapat mengindikasikan tingkat kesehatan UPKD yang bersangkutan.

Oleh karena itu, keadaan kesehatan UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dibagi menjadi 5 kondisi yaitu *sangat sehat*, *sehat*, *kurang sehat*, *tidak sehat* dan *sangat tidak sehat*. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa keadaan keuangan UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara selama masa BRDP termasuk dalam katagori *sehat* sebanyak 65,74 % dan dalam keadaan *tidak sehat* sebanyak 34,26 %.

Tabel 2. Distribusi Tingkat Kesehatan per Kabupaten

Kabupaten	Tingkat Kesehatan							Jumlah	% Sehat
	SEHAT			TIDAK SEHAT					
	Sgt Sehat	Sehat		Kurang Sehat		Tidak Sehat	Sgt Tdk Sehat		
	95 - 100	90 - <95	80 - <90	70 - <80	60 - <70	50 - <60	<50		
Bengkulu Utara	52	7	12	6	8	4	19	108	66%
Muko-Muko	12	1	4	1	1	2	4	25	68%
Seluma	13	4	6	2	3	1	14	43	53%
Bengkulu Selatan	13	3	2	0	2	2	16	38	47%
Kaur	13	1	6	0	3	6	13	42	48%
Kepahiang	6	7	10	4	1	2	2	32	72%
Rejang Lebong	30	5	13	1	1	0	1	51	94%
Lebong	1	0	1	3	3	8	14	30	7%

Tingkat kesehatan UPKD ini juga ternyata dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dari masyarakat setempat. Kondisi finansial UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara pada masa BRDP memang sangat beragam antara UPKD yang satu dengan yang lain, namun secara rata-rata menunjukkan kondisi finansial relatif baik. Hal ini dapat dilihat beberapa ratio keuangan UPKD tersebut. Data yang ada menunjukkan bahwa ratio keuangan UPKD di lihat dari sisi likuiditasnya menunjukkan angka lebih besar dari 1. Hal ini berarti UPKD memiliki kemampuan membayar kewajibannya dalam jangka pendek yang sangat baik. Kondisi yang baik ini tidak terlepas dari peranan manajemen BRDP yang selalu melakukan pembinaan secara kontinyu. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kondisi ini tetap dapat dipertahankan *setelah masa BRDP (pasca proyek)*, mengingat banyak fasilitas dari BRDP tidak diperoleh UPKD lagi.

Penggambaran kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas terjadi selama masa proyek BRDP, dimana semua UPKD memperoleh pembinaan dan pendampingan baik secara kelembagaan maupun pengurus/anggota lembaga. Setelah masa BRDP (setelah 31 Agustus 2005), UPKD telah menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten. Kabupaten memiliki anggaran yang terbatas untuk dapat mempertahankan sistem BRDP dalam melakukan pembinaan terhadap UPKD. *Salah satu contoh*, pada masa BRDP, setiap UPKD mendapatkan petugas fasilitator yang berfungsi membantu pengurus dalam menjalankan kegiatan UPKD sehari-hari dari administrasi sampai kegiatan teknis di lapangan, namun fasilitas ini sekarang sudah tidak ada lagi. *Contoh yang lain* adalah, pada masa BRDP seluruh permodalan UPKD dibantu seluruhnya dari proyek, namun hal ini tidak terjadi sekarang.

**Sekarang**, UPKD harus dapat memupuk modal sendiri dari modal yang diberikan BRDP. Artinya, UPKD harus dapat mempertahankan tingkat pengembalian anggota setinggi mungkin agar modal yang tertanam dapat terus diputar sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Hal ini berarti kondisi finansial UPKD harus tetap dipertahankan kesehatannya. Untuk itu, menjadi menarik untuk mengkaji UPKD setelah *lepas* dari masa proyek BRDP, termasuk probabilitas terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD.

## **1.2. Luaran Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun akan menghasilkan luaran :

1. Tingkat partisipasi anggota UPKD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam mempertahankan keberadaan UPKD setelah masa BRDP
2. Tingkat pengembalian kredit anggota UPKD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya setelah masa BRDP
3. Tingkat kesehatan UPKD selama dan pasca BRDP, dengan menggunakan kriteria yang sama saat proyek BRDP berakhir.
4. Memunculkan probabilitas terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD setelah lepas dari masa proyek BRDP.



5. Rekomendasi kebijakan untuk mempertahankan eksistensi UPKD yang didukung oleh masyarakat, untuk masyarakat dan atas pilihan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Gambaran Umum BRDP**

Pelaksanaan Bengkulu Regional Development Project (BRDP) pada dasarnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Propinsi Bengkulu melalui pembangunan pedesaan; meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi tinggi; dan mendukung kelestarian lingkungan hidup. Atas dasar tujuan-tujuan tersebut, maka diharapkan sasaran yang akan dicapai melalui BRDP ini adalah terciptanya sumber pendapatan bagi penduduk miskin di desa melalui usaha-usaha penciptaan lapangan kerja produktif; berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan; dan meningkatnya daya beli masyarakat melalui kegiatan peningkatan pendapatan.

Desa-desasasaran penerima program yang dipilih didasarkan pada beberapa kriteria antara lain desa-desatersebut berlokasi di tiga kabupaten (sebelum pemekaran), yakni kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan (sekarang menjadi 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) ; desa-desamiskin berdasarkan klasifikasi perkembangan desa di Propinsi Bengkulu; desa-desayang bersifat klaster atau berdekatan; dan desa-desayang tidak termasuk sasaran *Tree Crops Small Scale Project (TCSSP)* dan *Kerinci Seblat Integrated Concervation Development Project (ICDP)*.

Bengkulu Regional Development Project (BRDP) dilaksanakan atas dukungan dana pinjaman dari IBRD-Loan 4290-IND yang dimulai pada tahun 1998 dan berakhir pada 31 Desember 2005. Kegiatan Program BRDP, dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I, II, dan III, pada desasasaran lama yang berjumlah 220 desa, serta tahap IV dan V pada desa-desasasaran yang baru sebanyak 150 desa (sesuai dengan Loan Amandement 19 Februari 2004).

Pada tahap awal, atau yang lebih dikenal dengan desain awal, BRDP terdiri dari tiga komponen proyek, yaitu :

**Bagian A : *Village Infrastructure*** (Pembangunan Infrastruktur Desa), berupa pembangunan sarana dan prasarana publik untuk menunjang kegiatan ekonomi produktif. Tidak semua desa binaan BRDP melaksanakan pembangunan sarana/prasarana desa (Infrastruktur). Sarana/prasarana yang telah dibangun dari dana BRDP meliputi berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa seperti jalan desa/usahatani, jembatan, gorong-gorong, perbaikan/sarana pelengkap irigasi, pasar desa, kios pasar, TPI (tempat pelelangan ikan), fasilitas air bersih dan sebagainya. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan untuk menunjang kegiatan adopsi teknologi pertanian dan usaha ekonomi produktif, pembangunan dan rehabilitasi jalan usahatani desa lebih ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar transportasi hasil usahatani.

Kegiatan pembangunan sarana/prasarana desa dilakukan dengan pola padat karya dan dengan menggunakan tenaga kerja lokal. Namun bila tidak tersedia tenaga kerja terampil yang diperlukan maka berdasarkan musyawarah desa dapat dipekerjakan tenaga terampil dari luar desa yang bersangkutan. Pembangunan dan rehabilitasi sarana /prasarana desa pendukung program peningkatan ekonomi dilakukan jika masyarakat bersedia memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk modal, misalnya lahan, tenaga kerja, dan bahan-bahan lain serta pernyataan kesanggupan untuk memelihara fasilitas tersebut yang dituangkan dalam perjanjian rencana pengelolaan dan pemeliharaan. Pola dan ketentuan ini terlaksana dengan baik.

**Bagian B : *Village-Based Technology Adoption*** (Adopsi Teknologi), berupa 1) investasi proyek untuk uji seleksi teknologi pertanian; 2) penguatan kapasitas LKMD untuk uji dan replikasi teknologi terpilih, dan aplikasi teknologi pertanian melalui pelatihan lapangan oleh penyuluh; 3) peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk tanaman tahunan melalui pengadaan peralatan, bahan baku dan pelatihan; 4) peningkatan produksi benih tanaman tahunan oleh petani melalui bimbingan teknis oleh dinas kabupaten untuk tanaman pangan serta pengadaan peralatan dan bahan baku; 5) penguatan kapasitas BIPP dan; 6) penguatan implementasi proyek melalui peningkatan kapasitas staf di kabupaten penerima melalui pengadaan peralatan kantor, furnitur, dan kendaraan oleh BAPPEDA dan Workshop.

**Bagian C : *Capacity Building and Implementation Support*** (Pengembangan Kapasitas dan Pendukung Implementasi), berupa 1) penguatan kelembagaan desa dalam

hal teknis, finansial dan administrasi serta tim implementasi desa melalui kegiatan pelayanan, dukungan teknis kepada kelembagaan desa dalam disain dan konstruksi infrastruktur desa oleh tenaga lapangan; 2) identifikasi paket uji teknologi pertanian yang relevan, penyiapan peranan BPP dan Penyuluh Pertanian untuk masing-masing paket teknologi, monitoring, dan analisis terhadap uji teknologi yang dilakukan oleh IPTP; 3) penguatan implementasi proyek melalui konstruksi ruang BAPPEDA propinsi; asistensi teknis; serta workshop, supervisi proyek, monitoring dan evaluasi; 4) penguatan kapasitas kelembagaan desa untuk identifikasi, penyiapan rencana aksi untuk pengajuan sub serta implementasi sub proyek yang diusulkan melalui pengadaan pelayanan oleh fasilitator pengembangan masyarakat; 5) desiminasi konsep informasi pemda propinsi dan prosedur untuk implementasi bagi desa binaan dan lembaga keuangan termasuk pengadaan peralatan kantor, furnitur dan peralatan untuk pemda propinsi; dan 6) melaksanakan survei proyek yang bermanfaat di desa binaan.

Pada desain awal, proyek lebih difokuskan pada uji seleksi teknologi pertanian. Proyek di disain untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan guna meningkatkan taraf hidup dan kehidupan keluarga petani dengan merancang petani pioneer. Petani pioneer tersebut dibantu dalam usahataniya baik tanaman pangan atau perkebunan guna meningkatkan kemampuan dalam berusahatani. Program petani pioneer ini hanya ada pada Tahap I dan II, pada Tahap III (tahun 2001), sistem petani pioneer ini tidak berlaku lagi. Komoditi pilihan dan calon petani pioneer dipilih berdasarkan musyawarah desa. Pada sistem petani pioneer, pihak BRDP memberikan bantuan sarana produksi senilai Rp. 7.500.000,- per kelompok petani (*terdiri dari 5 orang, sehingga satu petani pioneer mendapatkan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,00 ,satu juta lima ratus ribu rupiah*). Berbagai jenis usahatani pioneer yang disepakati antara manajemen proyek BRDP dengan masyarakat desa adalah usahatani karet, mina padi, kopi, durian, kelapa sawit dan jagung. Namun, petani pioneer yang berhasil dalam usahanya sangat kecil (kurang dari 5%). Oleh karena itu, disain petani pioneer tidak cocok diterapkan. Dalam hal ini, kegagalan petani pioneer adalah tingginya resiko kegagalan usahatani dan ketidakpastian musim sepanjang tahun sehingga panen sering kali gagal. Kegagalan ini mengakibatkan terhentinya perputaran dana, sehingga petani yang lain tidak memperoleh kesempatan untuk dapat merasakan pemanfaatan proyek BRDP. Oleh sebab itu, pola petani pioneer

ini memberikan efek multiplier yang sangat lambat, mengingat proses produksi dari tanaman ini relatif lama (minimal 4 bulan untuk tanaman pangan). Dengan demikian jelas bahwa sistem pioneer ini tidak dapat menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Melihat kelemahan sistem ini, maka dilakukan *perubahan disain proyek*.

Pada Bulan Agustus 2000 dirumuskan konsep dasar modifikasi disain kegiatan BRDP dengan menerapkan acuan “*Open Menu Option*”, suatu disain kegiatan yang berorientasi pada *demand driven*. Disain BRDP yang demikian ini telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia, dan di setujui oleh Bank Dunia pada bulan November 2000. Diharapkan disain kegiatan BRDP ini lebih sesuai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang penekanan pada kemandirian masyarakat (*self-reliance community*). Wujud dari pandangan ini adalah dibentuknya organisasi pengelola tingkat desa yang menangani pelaksanaan komponen-komponen kegiatan dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, semuanya dikelola secara langsung dari, oleh, dan untuk masyarakat. Setelah satu tahun berjalan, program mengalami perubahan disain, yaitu :

**Bagian A : *Village Infrastructure*** (Pembangunan Infrastruktur Desa), meliputi proyek investasi infrastruktur pada desa binaan dan penguatan kapasitas tenaga lapangan dan finansial Pemda pada tingkat propinsi dan kabupaten untuk keperluan asistensi kepada desa binaan dalam proses dan implementasi proyek melalui pelaksanaan pelatihan.

**Bagian B : *Village-Based Technology Adoption and Related Income-Generating Activities*** (Adopsi Teknologi dan Pengembangan Ekonomi Produktif) meliputi proyek investasi pada desa binaan untuk uji teknologi pertanian terseleksi, penguatan kapasitas masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan inisiatif, investasi dan *income generating*; replikasi teknologi sejenis melalui pelaksanaan *grant* desa binaan; penguatan kapasitas petani untuk uji dan implikasi teknologi pertanian terseleksi melalui uji lapangan oleh PPL kerjasama dengan BPTP; hasil pelaksanaan program percontohan pelayanan pemasaran dan pengolahan oleh peminjam serta kerjasama dengan sektor swasta seperti dalam pengadaan dan pemasaran kopi di Kabupaten Kepahyang dengan AEKI (Assosiasi Ekspor Kopi Indonesia), untuk penanaman dan pengolahan karet di Kecamatan Kerkap dengan GAPKINDO, serta pada kecamatan lain yang memiliki

prospek komoditas pertanian untuk komoditi selain kopi dan karet pada kecamatan lainnya; penguatan implementasi melalui penguatan kapasitas staf PEMDA melalui pengadaan peralatan kantor, furnitur; dan penguatan kapasitas sekretariat CGC dalam supervisi proyek dan monev melalui pelaksanaan asistensi teknis, pelatihan, serta pengadaan furnitur dan peralatan.

Disain proyek berubah dari sistem petani pioneer ke disain yang baru, yaitu Program Kegiatan Desa (PKD). PKD dikelola dengan pendekatan berdasarkan perencanaan dari bawah dan kebutuhan masyarakat (*bottom up approach and demand driven*), melalui pilihan menu kegiatan desa dengan penggunaan dana maksimum Rp.200 juta per desa yang disalurkan secara bertahap selama proyek berlangsung (hingga *closing date*).

## **2.2. Gambaran Umum UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa)**

Pelaksanaan komponen-komponen kegiatan BRDP di tingkat desa dilakukan oleh suatu organisasi pengelola yang terdiri dari UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa), Tim Verifikasi Desa dan TPSPD (Tim Pelaksana Saran/Prasarana Desa). UPKD bertindak sebagai pengelola keuangan pada tingkat desa, dapat dikatakan sebagai lembaga terdepan dalam pengelolaan kegiatan desa. Tim Verifikasi bertindak sebagai penilai dalam menentukan kegiatan sasaran atau klien. Sementara TP SPD adalah pelaksana bagi kegiatan sarana prasarana. Pengelolaan kegiatan desa sebelumnya (dalam disain awal) terstruktur dalam LKMD. Dibentuknya organisasi pengelola yang independen dan lepas dari LKMD menunjukkan sifat kemandirian dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Desa (PKD)

Pembentukan dan pengembangan UPKD dilakukan dengan suatu asumsi bahwa masyarakat (desa) seharusnya mempunyai kemampuan untuk mengelola pembangunan sendiri. Merujuk pada sejarah struktur organisasi kegiatan desa, dari LKMD menjadi UPKD, maka suatu ciri lain yang melekat pada disain pengembangan UPKD adalah upaya desentralisasi pengelolaan kepada masyarakat sehingga PKD diharapkan benar-benar didukung oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan atas pilihan masyarakat sendiri.

Dana PKD disalurkan secara langsung kepada desa sasaran melalui transfer ke rekening unit pengelolaan keuangan desa (UPKD). UPKD akan menyalurkan dana

tersebut kepada individu atau kelompok masyarakat sesuai dengan kegiatan dan dana yang telah disetujui. Dana pinjaman kepada masyarakat desa adalah untuk kegiatan adopsi teknologi pertanian dan usaha ekonomi produktif. Dana pinjaman dari UPKD di bawah pengawasan BRDP bersifat dana bergulir dengan tingkat bunga sebesar 18 persen per tahun atau 1,5 persen per bulan (*flat*), dengan ketentuan pengembalian pokok pinjaman dan bunga harus dibayar setiap bulan maksimum selama 12 bulan, umumnya tanpa *grace periode*. Berdasarkan Juklak dan Juknis, bahwa besarnya pinjaman pertama maksimal sebesar Rp.1.500.000/pinjaman. Pemberian pinjaman dana dari UPKD ke nasabah disertai dengan agunan atau pengganti agunan yang setara dan disetujui oleh masyarakat desa setempat. Apabila agunan tidak dapat dipenuhi maka berdasarkan Juklak dan Juknis PKD, ada dua alternatif agunan pengganti yaitu (1) tanggung renteng antara anggota di dalam kelompok masyarakat (pokmas) dan (2) penerapan sistem tabungan beku (tabungan tidak dapat diambil/diblokir sementara).

Pengembalian pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan antara peminjam dan UPKD dan dibukukan oleh pengurus UPKD sesuai dengan tata administrasi yang berlaku. Dana hasil pengembalian ini dapat langsung dipinjamkan kembali kepada calon peminjam lainnya sesuai daftar tunggu yang ada. Angka pengembalian pinjaman dalam satu UPKD harus melebihi atau sama dengan angka 90 persen, apabila tidak tercapai maka UPKD tidak dapat mengajukan SP2D (surat perintah pencairan dana) berikutnya.

Apabila jumlah maksimum dana PKD telah dimanfaatkan dengan baik dan dinilai berhasil dalam meningkatkan perekonomian desa, dinyatakan dengan surat penghargaan/keputusan oleh Bupati (penilaiannya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati) maka UPKD dapat mengajukan usulan tambahan dana sebagai bonus yang secara kumulatif tidak melebihi Rp.100 juta per UPKD.

BRDP mengambil kebijakan untuk menyalurkan dana bergulir melalui UPKD secara bertahap, tahapan penyaluran dana ke UPKD ini dimulai dari tahap pertama sampai dengan terserap plafon dana BRDP maksimum sebesar Rp. 200 juta selama proyek. Dana ini sudah termasuk pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp 50 juta (25 persen). UPKD sebagai penanggungjawab keuangan di desa harus memiliki Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kepengurusan lengkap dan ketentuan administrasi lainnya. Pengurus UPKD mempertanggungjawabkan seluruh

kegiatan PKD melalui forum musyawarah desa atau mengumumkannya kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban UPKD disampaikan kepada Pimpro/Pimbapro kabupaten dan propinsi.

### **2.3. Beberapa Hasil Penelitian Tentang BRDP**

Salah satu kajian tentang BRDP dilakukan oleh Bappeda Propinsi Bengkulu bekerjasama dengan LSM TERAJU dengan judul *Studi Evaluasi dan Pengembangan BRDP Propinsi Bengkulu* (2003). Penelitian ini dilaksanakan pada saat proyek BRDP sedang berjalan (sebelum *closing date* 31 Agustus 2005). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 76 persen lebih nasabah memperoleh informasi tentang BRDP dari pengurus UPKD, sekitar 37 persen memperoleh informasi dari tetangga, 35 persen memperoleh informasi dari kepala desa, 25 persen memperoleh informasi dari PPL, 21 persen memperoleh informasi dari Pokja, 19 persen memperoleh informasi dari fasilitator, dan 14 persen memperoleh informasi dari manajemen proyek. Sedangkan untuk informasi Program Kegiatan Desa (PKD), pengurus UPKD juga pihak yang paling dominan perannya sebagai sumber informasi, diikuti secara berturut-turut oleh kepala desa, fasilitator, tetangga, PPL, dan pokja.

Hasil studi pada UPKD diketahui bahwa sekitar 93 persen UPKD telah memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Dengan demikian UPKD sebagai lembaga keuangan di desa telah memiliki legalitas berdasarkan kesepakatan anggota UPKD itu sendiri. AD dan ART dalam jangka panjang sangat diperlukan agar UPKD dapat eksis dan mengikat setiap elemen-elemen yang terkait baik pengurus maupun anggota. Kelengkapan kelembagaan lainnya seperti: buku tamu, kartu simpan pinjam, buku kas, buku DUM dan DUK serta buku agenda pencairan kredit telah dimiliki semua UPKD. Kelengkapan kelembagaan ini sangat menunjang kemajuan UPKD, apabila aturan-aturan kelembagaan telah dilaksanakan dengan baik maka akan terlihat transparansi pengurus dalam pengelolaan proyek ini. Sedangkan kelengkapan lain seperti: leaflet, booklet, spanduk belum dimiliki oleh semua UPKD yang ada, sehingga pensosialisasian Program Kegiatan Desa (PKD) belum dilakukan secara optimal. Selain itu hampir semua UPKD telah melakukan pertemuan dan rapat secara kontinu dan



insidentil yang bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UPKD maupun perencanaan UPKD kedepan. Pertemuan dan rapat ini memberikan peluang besar kepada UPKD untuk memecahkan permasalahan dan lebih meningkatkan eksistensi UPKD tersebut. Sekitar 80 persen UPKD telah membuat sanksi tertulis, yang berguna untuk mengurangi tunggakan anggota, namun sebagian besar UPKD belum menerapkan sanksi tersebut karena masih ada rasa kekeluargaan pengurus dalam pengelolaan UPKD.

Isian data keuangan UPKD memperlihatkan tingkat pemahaman yang masih beragam tentang standar akuntansi, beberapa kasus adalah masih ditemui angka neraca yang tidak setimbang antara aktiva dan pasiva, juga masih ditemui penempatan rekening yang berbeda-beda. Namun demikian, ketersediaan data keuangan pada seluruh UPKD merupakan suatu keunggulan komparatif lembaga UPKD dibanding lembaga keuangan mikro lainnya yang setingkat desa, dan merupakan potensi keunggulan kompetitif lembaga UPKD nantinya.

Berdasarkan data keuangan dari UPKD yang disurvei diperoleh beberapa indikator dan kondisi rata-rata keuangan UPKD secara keseluruhan. Data kondisi rata-rata keuangan UPKD menunjukkan bahwa piutang rata-rata kepada anggota merupakan rekening aktiva yang paling dominan yakni sekitar 73 persen, diikuti oleh rekening bank, kas, dan barang-barang inventaris. Komposisi aktiva yang demikian mencerminkan masih belum berkembangnya struktur aktiva. Selanjutnya dominasi piutang pada struktur aktiva UPKD dapat dipahami karena kegiatan utama UPKD adalah peminjaman dana BRDP kepada masyarakat. Sementara dana BRDP merupakan rekening passiva yang paling dominan yakni sekitar 89 persen, diikuti oleh SHU sekitar 4 persen, simpanan anggota sekitar 2 persen, dana cadangan, tabungan, dan saham yang masing-masingnya di bawah satu persen. Proporsi passiva yang demikian menggambarkan masih lemahnya kemampuan pemupukan dana oleh masyarakat dan sekaligus merupakan indikasi masih rendahnya keswadayaan masyarakat.

Rata-rata jumlah anggota UPKD adalah 95 orang laki-laki dan 30 orang perempuan, sehingga rata-rata anggota secara total adalah berjumlah 125 orang. Karakteristik nasabah berdasarkan jenis usaha yang dilakukan adalah sekitar 69 persen nasabah bergerak dibidang usahatani yang terdiri atas: usahatani palawija, mina padi,

ternak unggas, sayuran, kopi, nilam, karet, cokelat, padi sawah, sawit, perikanan. Sekitar 19 persen nasabah melakukan usaha dagang yang meliputi warung/kios, dagang hasil bumi dan depot kayu. Sekitar 8 persen nasabah melakukan usaha dibidang industri rumah tangga yang terdiri atas: gula aren, batu bata, tahu/tempe, kerupuk dan meubler, dan 4 persen jasa.

Masyarakat penerima program BRDP memiliki persepsi yang relatif sama tentang kesesuaian komoditi yang dipilih dari program adopsi/replikasi teknologi yang diterapkan, dan tingkat adopsi teknologi petani pioneer. Persepsi dimaksud adalah komoditi yang dipilih dalam program belum begitu sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada di masing-masing desa, dan belum terlihat kemampuan lebih dari petani pioneer dalam penerapan paket teknologi.

Persepsi masyarakat juga positif terhadap manfaat program BRDP. Analisis data persepsi nasabah terhadap program pengembangan ekonomi produktif secara keseluruhan masuk ke dalam kategori setuju. Hal ini memberikan indikasi penilaian positif masyarakat terhadap program BRDP. Berdasarkan persepsi masyarakat ini diperoleh gambaran secara umum bahwa program pengembangan ekonomi produktif telah meningkatkan volume usaha dan jumlah pelakunya serta telah mengurangi tingkat kemiskinan di masing-masing desa.

Secara umum nasabah memiliki persepsi bahwa proses peminjaman di UPKD lebih mudah dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, nasabah berpendapat bahwa penentuan jangka waktu pengembalian didasarkan pada jenis usaha. Analisis persepsi menunjukkan bahwa pengembalian pinjaman tidak semata-mata berasal dari hasil usaha yang di danai, tetapi juga dari sumber penerimaan lainnya. Persepsi lain yang mengemuka adalah tentang keterbukaan pengurus UPKD dan penyebab tunggakan. Secara keseluruhan keterbukaan pengurus masuk ke dalam kategori sedang. Sementara kegagalan usaha dianggap sebagai penyebab terjadinya tunggakan.

Ditinjau dari faktor masyarakat penerima program, keberlanjutan program BRDP terutama UPKD akan sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap status dana pinjaman BRDP, persepsi yang melandasi kemauan dalam membayarnya, dan optimisme tentang keberlanjutan UPKD itu sendiri. Dalam kaitan ini, hasil analisis persepsi masyarakat menunjukkan beberapa hal:

1. Secara keseluruhan persepsi masyarakat terhadap status dana pinjaman BRDP cukup positif ditandai dominannya persepsi bahwa dana pinjaman yang diperoleh adalah pinjaman anak cucu, atau hak bersama masyarakat, atau pinjaman melalui program BRDP. Walaupun demikian masih ada yang menganggap bahwa dana pinjaman BRDP ini adalah hibah murni.
2. Persepsi yang melandasi kemauan dalam membayar pinjaman cukup baik ditandai oleh dominannya persepsi bahwa pinjaman wajib dibayar agar tidak menjadi beban anak cucu dan pinjaman akan dibayar bila sanggup walaupun tidak ditagih. Namun demikian, masih ada persepsi bahwa pinjaman tidak harus dikembalikan bila tidak sanggup atau pinjaman akan dibayar bila sanggup dan ditagih.
3. Program BRDP terutama keberadaan UPKD memberikan manfaat pada masyarakat merupakan persepsi yang dominan. Oleh sebab itu masyarakat optimis UPKD akan dapat bertahan dan berkembang.

Hasil analisis persepsi terhadap faktor di atas mengindikasikan bahwa masyarakat penerima program BRDP bukan faktor penghambat bagi keberlanjutan program.

#### **2.4. Pemberdayaan Masyarakat dengan Kredit Bergulir Melalui UPKD (Kredit dan Partisipasi Masyarakat)**

Istilah Credit, berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan (*trust and faith*). Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. (Sinungan, 1995).

Secara umum kredit adalah peminjaman yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk meningkatkan usahanya untuk mencapai keuntungan yang dicita-citakan. Dalam praktiknya kredit bank adalah pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabahnya untuk membiayai kegiatan usahanya dalam jumlah tertentu dan dalam jangka tertentu yang disepakati bersama antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama dituang dalam suatu perjanjian kredit yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali kreditnya termasuk beban bunganya.

Menurut Tjiptoadinugroho (1990) definisi kredit adalah kepercayaan suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah pengkreditan dalam arti yang sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam, dan ragamnya dan darimanapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya. Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan disebutkan bahwa : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan atas pembagian hasil keuntungan.

Partisipasi adalah suatu kontribusi sukarela dari masyarakat terhadap program pemerintah yang dapat menunjang pembangunan nasional tanpa turut serta dalam pembuatan program itu sendiri atau mengkritik tentang isinya (*Community Journal* Vol. 8 No.3.1973 dalam Utama.1988).

Menurut Hamijoyo (1989), partisipasi berarti ikut serta, yakni mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataan pemerintahlah yang sampai saat dewasa ini merupakan penyelenggaraan dan sekaligus pembayar utama dari setiap pembangunan.

Berdasarkan pengertian diatas, partisipasi mengandung sikap, perbuatan dan tindakan yang didasari oleh kemampuan dan kesadaran yang tumbuh dari seseorang, keluarga atau masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan suatu kegiatan pembangunan dalam memajukan kesejahteraan bersama.

Menurut Hamijoyo (1989), bentuk partisipasi yakni sebagai berikut :

1. Partisipasi Buah Pikiran

Bentuk partisipasi buah pikiran yaitu keikutsertaan masyarakat memberikan sumbangan pikiran, inisiatif, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki diberikan atas sesuatu kegiatan pembangunan. Partisipasi buah pikiran ini sering dijumpai pada pertemuan-pertemuan masyarakat, rapat kerja untuk menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan dalam langkah-langkah dan kebijaksanaan pembangunan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Partisipasi Tenaga

Bentuk partisipasi tenaga yakni keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan untuk menyumbangkan tenaganya. Partisipasi ini ada dua macam, yakni 1. partisipasi wajib

seperti gotong royong yang diputuskan LKMD, 2. partisipasi spontan atas dasar sukarela.

### 3. Partisipasi Harta Benda/Uang

Bentuk partisipasi ini berupa keikutsertaan memberi sebagian harta benda yang dimiliki untuk diberikan dalam suatu keperluan. Partisipasi ini dalam masyarakat ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan proyek atau program pembangunan, maka pemerintah tidak dapat menjalankan proyek atau program pembangunan tanpa adanya partisipasi peserta atau masyarakat. Partisipasi merupakan indikator berhasil atau tidaknya proyek atau program pembangunan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, partisipasi adalah keterlibatan peserta atau masyarakat secara mental dan emosional terhadap suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan yang akan dinikmati secara bersama-sama oleh semua anggota.

*Bengkulu Regional Development Project (BRDP)* merupakan suatu program pembanguana desa yang memiliki kharakteristik khusus. Kekhususan tersebut nampak pada penyusunan program yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan komonitas sasaran. Kegiatan pengembangan ekonomi produktif diimplementasikan melalui penyediaan pembiayaan bagi kegiatan yang disusun dan diusulkan oleh masyarakat desa. Ciri tersebut sebenarnya bersumber dari pergeseran paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada mekanisme *bottom-up* dibandingkan dengan *top-down*. Program kegiatan Desa (PKD) menjadi media dinamisasi aspirasi komunitas sasaran melalui penerapan pola partisipatif dan inisiatif. Sementara itu, aparat formal desa diposisikan sebagai mitra kerja dan fasilitasi program pembangunan desa dan bukannya penentu utama.

Dalam rangka akselerasi pelaksanaan PKD, maka dibentuklah sebuah lembaga didesa yang bertugas untuk mengelola program-program pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga tersebut adalah Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) yang dalam jangka panjang diarahkan sebagai lembaga keuangan desa yang mandiri dan transparan. Perputaran dana di desa menjadi indikator keberhasilan UPKD dengan tingkat pengembalian yang relative cukup tinggi meskipun di beberapa desa mengalami stagnasi perputaran.

Program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari paradigma pembangunan untuk rakyat dan bukan sama sekali pembangunan untuk aparat, apalagi dipandang sebagai proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah semata. Oleh karena itu program tersebut harus dipandang dan dilaksanakan oleh masyarakat dan dilestarikan serta dinikmati oleh masyarakat sendiri. Disisi lain kelompok masyarakat yang mampu harus membantu kelompok masyarakat yang menderita. Agar program tersebut berjalan baik dan tepat sasaran maka perlu dipantau dan dievaluasi (Sumodinigrat, 1999). Evaluasi terhadap proyek-proyek pemerintah baik yang didanai melalui keuangan pemerintah maupun lembaga donor seperti Bank dunia, bertujuan memberikan gambaran kinerja (performance) dari suatu proyek secara keseluruhan. Evaluasi (Sukiyono dan Musriyadi, 2004) merupakan aktivitas internal dan eksternal manajemen untuk menilai kepatutan dari rancangan program dan metode implementasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, menilai hasil yang diinginkan maupun tidak dari suatu program, serta menilai factor yang mempengaruhi tingkat dan distribusi yang dihasilkan. Augusta (2003), Wahyuni, Nuraini, dan Yuliaty (2003) selama ini proyek-proyek pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah yang berjalan secara *top-down*, dapat dipastikan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap proyek dan program dilakukan secara *top-down*. Evaluasi yang dilaksanakan baik terhadap aturan normatif maupun hasil riil proyek hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan administrasi saja, tapi jauh dari makna pemberdayaan (*empowerment*) itu sendiri.

Proyek BRDP sejauh pengamatan penulis merupakan aktifitas proyek pembangunan yang dijalankan melalui pola *mixed* (top-down dan bottom-up). Artinya evaluasi harus dijalankan melalui pola *mixed* pula agar diperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan, yang bersumber dari semua stakeholders yang terlibat pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Idealnya evaluasi yang dilakukan menurut Augusta (2003) harus mencakup dua aspek *normative* yang mencakup konsistensi logis antara tujuan dan latar belakang program, pemanfaat, lokasi, pendekatan dan prinsip pengelolaan, organisasi pelaksana, pemantauan, pelaporan, penyebaran informasi, sumberdana, alokasi dana, dan penyaluran dana. Sedangkan aspek *outcome* riil proyek mencakup proses social yaitu proses desentralisasi, partisipasi masyarakat, transparansi, swadaya dan kompetisi yang sehat, keluarga pemanfaat, kelompok, dan pertemuan desa, unsur pemerintah dan

lembaga bentukan pemerintah, pendamping serta tahapan perencanaan kegiatan desa serta evaluasi konseptual yang memungkinkan perbaikan perencanaan dan peramalan program.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai pada tahun pertama ini (Tahun 2009) adalah :

1. Mengetahui tingkat partisipasi anggota UPKD dan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi dalam mempertahankan keberadaan UPKD setelah masa BRDP
2. Mengetahui tingkat pengembalian kredit anggota UPKD dan faktor - faktor yang mempengaruhinya setelah masa BRDP
3. Mengetahui tingkat kesehatan UPKD selama dan pasca BRDP

Sedangkan tujuan penelitian pada tahun ke-dua (Tahun 2010) adalah untuk mengetahui probabilitas terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD pasca proyek BRDP

#### **3.2. Manfaat Penelitian**

Pembentukan dan pengembangan UPKD dilakukan dengan asumsi bahwa masyarakat desa seharusnya mempunyai kemampuan untuk mengelola sendiri pembangunan desa tanpa campur tangan pemerintah, dengan kata lain program UPKD harus benar-benar didukung oleh masyarakat, untuk masyarakat dan atas pilihan masyarakat.

Seperti diketahui bahwa proyek BRDP telah dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2005. Berakhirnya proyek ini membawa konsekuensi logis terhadap pengelolaan seluruh asset yang didanainya. BRDP secara kelembagaan sudah tidak bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas dan asset yang pernah didanainya, termasuk didalamnya adalah keberlanjutan dari UPKD.

UPKD yang telah dilembagakan secara formal selama masa BRDP, pada saat setelah berakhirnya proyek harus dapat tetap bertahan keberadaannya ditengah masyarakat pedesaan. Pemerintah daerah melalui Bappeda Kabupaten, telah memayungi lembaga ini dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengelolaan UPKD,



sehingga lembaga ini tetap menjadi satu lembaga yang memiliki kemampuan memberikan pinjaman pendanaan bagi ekonomi produktif di pedesaan pasca BRDP.

Selama masa BRDP, UPKD mendapatkan banyak bantuan dari proyek, baik bantuan modal maupun manajemen. Bantuan ini mengharuskan pengurus dan kelompok kerja (POKJA) UPKD untuk membuat laporan kondisi UPKD secara kontinu setiap bulan, karena pihak BRDP melakukan monitoring yang ketat dan teratur terhadap keberadaan UPKD. Laporan bulanan ini dapat melihat perkembangan UPKD setiap waktu.

Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro untuk permodalan masyarakat petani khususnya, merupakan subsistem penunjang dalam pengembangan sistem agribisnis secara menyeluruh. Keberadaan UPKD mutlak diperlukan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah permodalan yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan ini akan memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi dan pengembalian kredit anggota serta kesehatan keuangan Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) Pasca *Bengkulu Regional Development Project* (BRDP) di Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah untuk menentukan kebijaksanaan dalam mempertahankan keutuhan UPKD sebagai salah satu sumber modal pedesaan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk membantu usaha ekonomi produktif.

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran kinerja lembaga keuangan mikro seperti UPKD setelah lepas dari masa proyek *Bengkulu Regional Development Project*, dimana selama masa proyek kinerja UPKD secara umum dengan berbagai program pembinaan dan pendampingan baik terhadap kelembagaan maupun terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan terhadap pola pengembangan lembaga keuangan untuk sumber permodalan masyarakat dalam pengembangan agribisnis agar dapat tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan ini akan memunculkan kondisi aktual Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) pasca proyek BRDP, baik kondisi tingkat partisipasi masyarakat sebagai peminjam, tingkat pengembalian pinjaman oleh peminjam, dan tingkat kesehatan UPKD. Penelitian ini juga akan memunculkan probabilitas

terjadinya kegagalan dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro, khususnya UPKD setelah lepas dari masa proyek.

Hasil penelitian ini menjadi sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi sebagai bahan perumusan dan penentuan kebijakan yang tepat dalam mempertahankan eksistensi UPKD yang didukung oleh masyarakat, untuk masyarakat dan atas pilihan masyarakat

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4.1. Metode Pengumpulan Data

Informasi dan data dikumpulkan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap responden dan informan kunci, dengan menggunakan suatu pedoman pertanyaan sebagai pemandu arah wawancara (kuesioner). Studi dokumen pada dasarnya menghasilkan data berupa laporan-laporan, makalah-makalah, dan surat-surat resmi yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung bagi data hasil wawancara. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap hasil wawancara dan diskusi

#### 4.2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*), yaitu Kabupaten Bengkulu Utara. Ada beberapa pertimbangan yang melandasi pemikiran ini, yaitu :

- a. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki jumlah desa binaan yang paling banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu 108 desa dari total 370 desa binaan BRDP di Propinsi Bengkulu (sekitar 30%).
- b. Berdasarkan penilaian terhadap kelembagaan UPKD yang dilakukan oleh manajemen proyek, maka Kabupaten Bengkulu Utara memiliki paling banyak desa dengan kategori sangat sehat (40 desa) dan juga memiliki paling banyak desa dengan kategori sangat tidak sehat (17 desa).

#### 4.3. Metode Sampling

Sampling dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu :

1. Tahap *pertama* adalah pemilihan jumlah UPKD sebagai objek kajian penelitian. Berdasarkan data tingkat kesehatan UPKD per Juli 2005 dapat dihitung jumlah sampel dengan persamaan:

$$n = \frac{(\sum N_i \cdot \sigma_i)^2}{N^2 D + \sum N_i \cdot \sigma_i^2}$$

Dengan persamaan tersebut, maka diperoleh jumlah UPKD sampel sebanyak 6 UPKD.

2. Tahap *kedua* adalah penentuan jumlah UPKD berdasarkan strata tingkat kesehatan UPKD. Jumlah UPKD yang dipilih sebagai objek kajian berdasarkan strata dilakukan dengan menggunakan metode acak distratifikasi (*Stratified Random Sampling*). *Stratified Random Sampling* adalah sampel yang ditarik dengan memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok-kelompok yang tidak *overlapping* yang disebut *strata*, dan kemudian memilih sebuah sampel secara random dari setiap *stratum* (Nazir, 2003). Dengan menggunakan persamaan :

$$n_i = \frac{N_i \cdot \sigma_i^2}{\sum N_i \cdot \sigma_i^2} \cdot N$$

maka diperoleh distribusi jumlah UPKD untuk setiap strata adalah :

Tabel 3. Alokasi Sampel Untuk Setiap Strata Tingkat Kesehatan UPKD

Strata	$N_i$	$\sigma_i^2$	$\sigma_i$	$N_i \cdot \sigma_i$	$n_i$
UPKD Sangat Sehat	37	63,64308	7,977661	295,17347	1
UPKD Sehat	35	170,644	13,06308	457,2077	2
UPKD Cukup Sehat	6	33,77967	5,812028	34,872167	1
UPKD Tidak Sehat	13	264,2045	16,25437	211,30679	1
UPKD Sangat Tidak Sehat	17	315,1396	17,75217	301,78693	1
Jumlah	108			1300,3471	6

Sumber: Laporan Tingkat Kesehatan UPKD per Juli 2005, diolah

3. Setelah diperoleh alokasi sampel untuk setiap strata, maka tahap *ketiga* adalah pengambilan sampel UPKD secara acak sederhana (*simple random sampling*) melalui cara undian. Dengan metode tersebut, maka desa-desa yang menjadi sampel penelitian adalah :

Tabel 4. Nama Desa-desanya Sampel Berdasarkan Strata Tingkat Kesehatan UPKD

Strata	Σ Populasi	Σ Sampel	UPKD sampel
UPKD Sangat Sehat	37	1	Kemumu
UPKD Sehat	35	2	Pulau Panggung & Tepi Laut
UPKD Cukup Sehat	6	1	Selolong
UPKD Tidak Sehat	13	1	Tanjung Agung Palik
UPKD Sangat Tidak Sehat	17	1	Air Padang

Sumber: Laporan Tingkat Kesehatan UPKD per Juli 2005, diolah

4. Tahap keempat adalah pemilihan responden dari UPKD terpilih yang menjadi objek kajian penelitian. Jumlah responden untuk setiap UPKD akan dipilih secara acak (*simple random sampling*) dengan jumlah 30 orang per UPKD. Penetapan angka 30 karena dianggap sebagai jumlah yang memadai dan dalam uji statistik, jumlah responden 30 dan lebih besar 30 tidak memiliki perbedaan nilai yang signifikan. Disamping itu, saat ini juga belum tersedia jumlah populasi anggota UPKD. Dengan demikian, jumlah anggota UPKD sebagai responden dalam penelitian ini adalah 180 orang.

#### 4.4. Metode Analisis Data

##### a. Analisis Data untuk Partisipasi

Untuk menguji menjawab tujuan penelitian yang berkenaan dengan partisipasi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi digunakan alat statistik non parametrik, yaitu uji korelasi rank spearman (siegel,1992)

$$r_s = \frac{1 - 6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N^3 - N}$$

dimana:

$r_s$  = Koefisien korelasi rank spearman

$N$  = Jumlah sampel

$d_i$  = Selisih antara ranking suatu variable bebas dan ranking variable terikat pada responden ke-i

untuk mengkaji signifikan maka digunakan uji t dengan rumus:

$$t_{hitung} = r_s \sqrt{\frac{N-2}{1-r^2}}$$

dengan kriteria pengujian:

- $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima atau  $H_o$  ditolak artinya terdapat hubungan yang nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- $t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_o$  diterima atau  $H_a$  ditolak artinya terdapat hubungan yang tidak nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat

#### ***b. Analisis Data untuk Tingkat Pengembalian dan Faktor-faktor Pengaruh***

Untuk menentukan tingkat pengembalian, maka digunakan persamaan :

$$\text{Tingkat pengembalian kredit dalam \%} = \frac{\text{Jumlah angsuran sampai tahun terakhir}}{\text{Jumlah total kredit}} \times 100 \%$$

Sedangkan untuk menentukan keterkaitan tingkat pengembalian dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya digunakan model analisis regresi linier berganda (Supranto, 1983) dengan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

dimana :

- Y = Tingkat Pengembalian Kredit ( % )
- X<sub>1</sub> = Umur (Tahun)
- X<sub>2</sub> = Jumlah Tanggungan Keluarga (Orang)
- X<sub>3</sub> = Konsumsi Rumah Tangga (Rp/Bln)
- X<sub>4</sub> = Pendapatan Rumah Tangga (Rp/Bln)
- X<sub>5</sub> = Lamanya Menjadi Nasabah (Tahun)
- a = Intersep
- b<sub>i</sub> = Koefisien Regresi
- i = 1,2,3
- e = Kesalahan Pengganggu

Uji pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan uji F sebagai berikut dengan taraf kepercayaan 95 % ( $\alpha = 0,05$ ).

$$F_{hitung} = \frac{F^2 / k - 1}{(1 - R^2) n - k}$$

dengan hipotesis :

Ho :  $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = 0$

Hi : Paling tidak ada salah satu  $b_i$  yang tidak sama dengan 0 ( $b_i \neq 0$ )

dimana :

$R^2$  = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel yang diamati

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_o$  ditolak dan  $H_i$  diterima, artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_o$  diterima dan  $H_i$  ditolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji t. Nilai hitung diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$T_{hitung} = \frac{b_i}{Sb_i}$$

dimana :  $H_o : b_i = 0$

$H_i : b_i \neq 0$

Dengan kriteria pengujian :

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ , maka  $H_o$  ditolak dan  $H_i$  diterima. Hal ini berarti berpengaruh nyata secara individu variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat.
- Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$ , maka  $H_o$  diterima dan  $H_i$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa berpengaruh tidak nyata secara individu variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat

### ***c. Analisis Data untuk Menentukan Tingkat Kesehatan UPKD***

Agar tingkat kesehatan UPKD setelah proyek BRDP dapat dibandingkan dengan tingkat kesehatan selama proyek BRDP, maka digunakan kriteria yang sama. Pengukuran tingkat kesehatan UPKD dilakukan berdasarkan indikator yang terdapat dalam Buku Panduan UPKD (2004) yaitu dengan menggunakan skor berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden. Setiap pertanyaan mempunyai bobot tertentu yaitu 10, 6, 4 dan 2. Penentuan bobot ini didasarkan pada seberapa penting pertanyaan yang diajukan dalam proses pelaksanaan kegiatan UPKD. Semakin tinggi bobot suatu pertanyaan maka semakin penting kegiatan yang dilakukan dan mempengaruhi tingkat kesehatan UPKD.

Pertanyaan dengan bobot 10 meliputi:

- Masalah yang dihadapi oleh UPKD
- Kegiatan verifikasi proposal oleh Tim Pokja
- Tingkat pengembalian nasabah
- Pemberlakuan sanksi terhadap nasabah bermasalah

Pertanyaan dengan bobot 6 meliputi:

- Kinerja, transparansi dan tanggung jawab pengurus
- Pengawasan kinerja pengurus
- Jenis usaha yang didanai
- Keadaan laba tahun terakhir
- Bukti penerimaan dan pengeluaran kas UPKD

Pertanyaan dengan bobot 4 meliputi:

- Kaderisasi pengurus UPKD
- Keadaan keuangan UPKD
- Kesesuaian proposal kredit dengan pelaksanaannya, administrasi angsuran kredit dan penanganan kredit yang jatuh tempo
- Penetapan batas kas maksimal dan pemeriksaan kas UPKD

Pertanyaan dengan bobot 2 meliputi:

- Organisasi UPKD
- Tatacara dan pengelolaan kredit serta penetapan denda keterlambatan
- Pengelolaan tabungan masyarakat



- Pembukuan kas UPKD

Setiap pertanyaan akan diberikan jawaban dengan skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Setelah memperoleh jumlah skor dari setiap pertanyaan maka rata-rata skor tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kategori penilaian tingkat kesehatan UPKD di bawah ini:

- Rata-rata 4,35 - 5,00 = UPKD Sangat Sehat
- Rata-rata 3,75 - < 4,35 = UPKD Sehat
- Rata-rata 3,00 - < 3,75 = UPKD Cukup Sehat
- Rata-rata 2,35 - < 3,00 = UPKD Tidak Sehat
- Rata-rata 1,00 - < 2,35 = UPKD Sangat Tidak Sehat

#### ***d. Analisis Data untuk Probabilitas Terjadinya Kegagalan Pengelolaan UPKD (Tahun II)***

Untuk menggambarkan atau menjelaskan probabilitas terjadinya kegagalan pengelolaan UPKD pasca BRDP digunakan analisis probit binary. Analisis Probit Binary (*a binary probit analysis*) adalah suatu analisis yang sering digunakan dalam aplikasi ekonometrika di mana motivasi penggunaannya dimotivasi oleh kerangka variabel laten atau tidak terobservasi. Lebih lanjut, model ini digunakan pada variabel-variabel yang lebih banyak mempunyai dua nilai (*binary* atau variabel dummy), yakni 1 dan 0. Salandro dan Harrison (1997) serta O'Donnel, et al (1999) adalah dua peneliti yang mengaplikasikan model probit ini. Salandro dan Harrison meneliti tentang faktor penentu permintaan kredit. Sedangkan O'Donnel et. al (1999) meneliti kekerasan yang terjadi pada wanita yang dipengaruhi oleh atribut yang dimiliki oleh wanita yang bersangkutan.

Dengan mengadopsi kerangka pemikiran O'Donnel et al (1999), maka kecenderungan terjadinya kegagalan dalam pengelolaan UPKD akan dianalisa berdasarkan atribut-atribut yang melekat pada UPKD yang menjadi objek penelitian ini. Yang dimaksud dengan atribut-atribut UPKD disini adalah faktor-faktor penentu seperti administrasi dan operasional, termasuk di sini adalah atribut dari anggota UPKD.

Secara umum, model probit binary dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misal  $Z_i$  yang mengukur probabilitas kegagalan yang dihadapi oleh UPKD  $i$  yang diasumsikan sebagai variabel yang tidak terobservasi. Nilai  $Z_i$  ini dipengaruhi oleh satu set variabel penjelas (atribut anggota UPKD), sehingga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Z_i = x_i\beta \quad i = 1, \dots, N \quad (1)$$

dimana  $\beta = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{K-1})$  adalah  $K - 1$  vektor dari parameter yang tidak ter jelaskan yang akan diestimasi,  $x_i$  adalah variabel penjelas (*explanatory variable*) yang mengukur atribut yang dimiliki oleh rumah tangga, seperti ratio ketergantungan, dan  $N$  adalah jumlah observasi.

Parameter  $\beta = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{K-1})$  tidak dapat diestimasi dengan menggunakan teknik standar regresi linier karena variabel  $Z_i$  tidak terobservasi. Tetapi, data yang terkumpul termasuk variabel  $Y_i$  yaitu variabel yang hanya mempunyai nilai 1 dan 0.  $Y_i = 1$  jika rumah tangga  $i$  mempunyai pengalaman kegagalan pada tahun yang lalu, sebaliknya jika  $Y_i = 0$ . Sebagai catatan, pengukuran  $Y_i$  didapatkan dari pengukuran kegagalan seperti yang dimaksudkan pada tujuan pertama dan konseptualisasi dan definisi dari penelitian ini. Penggunaan nilai 1 dan 0 cukup beralasan dalam berekspektasi bahwa jika resiko yang dihadapi oleh UPKD  $i$  adalah tinggi ( $Z_i$  tinggi), maka UPKD yang dimaksud akan mengalami peluang kegagalan dalam satu tahun terakhir ( $Y_i = 1$ ). Dengan demikian ide ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{jika } Z_i > v_i \\ 0 & \text{jika sebaliknya} \end{cases} \quad (2)$$

dimana  $V_i$  adalah tingkat awal *random* tak terobservasi. Dengan demikian, kemungkinan suatu UPKD akan mengalami kegagalan dalam satu tahun terakhir adalah:

$$\begin{aligned} P_i &= p(Y_i = 1) \\ &= p(Z_i > v_i) \\ &= P(V_i < Z_i) \\ &= F(Z_i) \\ &= F(x_i\beta) \end{aligned} \quad (3)$$

dimana  $F(x)$  adalah fungsi distribusi kumulatif (*cumulative distribution function = cdf*) dari variabel *random*  $v_i$  yang dievaluasi pada  $x$ .

Parameter dari model probit binary diestimasi dengan menggunakan metode *maximum likelihood* (ML). Metode ini sangat populer karena metode ini mempunyai dasar teori yang cukup baik (Judge et al, 1985). ML adalah suatu metode untuk memilih parameter yang diestimasi dengan cara memaksimalkan probabilitas atau *likelihood* dari data observasi yang dimiliki.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Karakteristik Anggota UPKD

Karakteristik anggota UPKD meliputi umur, pendidikan formal, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan anggota UPKD dan lama keanggotaan UPKD.

##### *Umur*

Tingkat umur anggota UPKD akan berpengaruh pada tingkat produktifitas kerja sehingga berdampak pada tingkat pengembalian kredit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara, didapat umur anggota UPKD berkisar antara 22 tahun sampai dengan 70 tahun dengan rata-rata 40 tahun, jumlah anggota UPKD yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 141 orang dan perempuan sebanyak 39 orang. Tabel 5, menunjukkan bahwa persentase terbesar dari umur anggota UPKD di daerah penelitan terdapat pada kelompok umur antara 36 tahun sampai 45 tahun yaitu sebesar 44 persen dan persentase terendah terdapat sebesar 23 persen pada kelompok umur di atas 45 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kelompok Umur Anggota UPKD di Bengkulu Utara

Kategori	Kelompok umur (tahun)	Interval	Rerata	Persentase (%)
Tua	> 45	22 - 70	40, 26	23
Sedang	36 – 45			44
Muda	< 36			33
Jumlah				100

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Responden , 2009 (Data selengkapnya pada Lamp. 1)*

*Keterangan : n = 180 anggota*

##### *Pendidikan Formal*

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan seseorang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan akan menentukan seseorang dalam berfikir, bersikap dan bertindak dalam mengolah usahanya seperti kemampuan dalam menyerap suatu inovasi baru. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Anggota UPKD di Bengkulu Utara

Kategori	Lama pendidikan (tahun)	Interval	Rerata	Persentase (%)
Tinggi	> 11	0 – 16	9,14	37
Sedang	8 – 11			32
Rendah	< 8			32
Jumlah				100

Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009 (Data selengkapnya pada Lamp. 1)

Keterangan : n = 180 anggota

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa pendidikan formal yang ditempuh oleh anggota UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara rata-rata 9,14 tahun. Bila memperhatikan dari tingkat pendidikan formal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa anggota UPKD di daerah penelitian mempunyai tingkat pendidikan formal yang relatif tinggi sebesar 37 persen.

### ***Jenis Pekerjaan***

Anggota UPKD memiliki jenis pekerjaan yang beragam, jenis pekerjaan anggota UPKD yang paling banyak adalah pekerjaan di bidang pertanian, yaitu sebagai petani karet, sawit dan sebagai nelayan sebesar 115 orang atau 64 persen. Anggota UPKD yang bergerak di bidang jasa yang terdiri dari buruh, pegawai, supir sebesar 12 orang atau 7 persen, dan yang bergerak di bidang perdagangan sebanyak 51 orang 28 persen, sedangkan 2 orang atau 1 persen dari Ibu Rumah Tangga.

Sedangkan anggota UPKD yang mempunyai pekerjaan sampingan di bidang pertanian hanya 10 persen, di bidang jasa juga hanya 2 persen dan untuk bidang perdagangan mencapai 12 persen.

Tabel 7. Jenis Pekerjaan Anggota UPKD di Bengkulu Utara

Jenis Pekerjaan		Jumlah	Persentase (%)
Pekerjaan Utama	Pertanian	115	64
	Jasa	12	7
	Perdagangan	51	28
	DIK	2	1
Pekerjaan Sampingan	Pertanian	18	10
	Jasa	3	2
	Perdagangan	22	12

Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009 (Data selengkapnya pada Lamp. 1)

Keterangan : n = 180 anggota

### ***Jumlah Tanggungan Keluarga***

Jumlah tanggungan keluarga merupakan banyaknya anggota keluarga yang biaya hidupnya ditanggung oleh kepala keluarga. Besarnya tanggungan keluarga anggota UPKD akan menyebabkan besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung oleh anggota UPKD. Semakin besar jumlah tanggungan keluarga maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan akan konsumsi. Adapun gambar tentang tanggungan keluarga anggota UPKD dapat dilihat pada Tabel 8.

***Tabel 8. Jumlah Tanggungan Anggota UPKD di Bengkulu Utara***

Kategori	Tanggungan (jiwa)	Interval	Rerata	Persentase (%)
Banyak	> 3			26
Sedang	2 – 3	0 – 6	3	68
Sedikit	< 2			6
Jumlah				100

*Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009 (Data selengkapnya pada Lamp. 1)*

*Keterangan : n = 180 anggota*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah tanggungan keluarga di daerah penelitian adalah sebanyak 3 orang. Persentase jumlah anggota keluarga terbesar antara 2 sampai 3 orang adalah sebesar 68 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa umumnya jumlah rata-rata anggota keluarga di daerah penelitian relatif sedang atau dengan kata lain anggota UPKD memiliki anggota keluarga yang tidak terlalu banyak.

### ***Pendapatan Anggota UPKD***

Pendapatan anggota UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

***Tabel 9. Pendapatan Anggota UPKD di Bengkulu Utara***

Jenis Pekerjaan	Total (Rp/bln)	Rata-rata (Rp/bln)
Pertanian	Rp. 276.334.900	Rp. 1.535.193,89
Jasa	Rp. 3.2824.000	Rp. 182.355,6
Perdagangan	Rp. 35.300.000	Rp. 197.206,70

*Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009 (Data selengkapnya pada Lamp. 1)*

*Keterangan : n = 180 anggota*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan nasabah UPKD yang mempunyai pekerjaan dibidang pertanian mempunyai pendapatan sebesar Rp. 1.535.193,89. Sedangkan untuk nasabah yang mempunyai pekerjaan dibidang jasa hanya mempunyai rata-rata penghasilan sebesar Rp. 182.355,6 dan untuk bidang perdagangan rata-rata mempunyai pendapatan sebesar Rp. 197.206,70.

### ***Lama Keanggotaan UPKD***

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa berdasarkan lamanya menjadi anggota UPKD dapat disimpulkan bahwa sebanyak 48 persen anggota UPKD telah menjadi anggota UPKD selama 3-4 tahun atau masuk dalam kategori sedang, sebanyak 27 persen anggota UPKD telah menjadi anggota selama > 4 tahun atau masuk dalam kategori lama. Untuk anggota UPKD yang menjadi anggota < 3 tahun atau masuk dalam kategori baru adalah sebesar 25 persen.

Tabel 10. Lama Keanggotaan UPKD di Bengkulu Utara

Kategori	Kelompok Lama Keanggotaan (tahun)	Interval	Rerata	Persentase (%)
Lama	> 4	1 - 7	3, 478	27
Sedang	3 – 4			48
Baru	< 3			25
Jumlah				100

*Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009 (Data selengkapnya pada Lamp. 1)*

*Keterangan : n = 180 anggota*

## **5.2. Partisipasi Anggota UPKD Terhadap Keberlangsungan UPKD dan Faktor – faktor yang Berhubungan**

### ***Partisipasi Anggota UPKD***

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari survai dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi anggota UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara dalam pengembalian pinjaman masih tinggi yaitu sebesar 80,5 persen. Sedangkan partisipasi anggota UPKD dalam menghadiri pertemuan/ rapat tergolong rendah yaitu hanya 56,4 persen. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota UPKD dalam

mempertahankan keberlangsungan UPKD secara rata-rata adalah sebesar 68,45 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang sama pada saat UPKD masih menerima fasilitas dari BRDP yaitu sebesar 80 persen.

Tabel 11. Tingkat Partisipasi Anggota UPKD di Bengkulu Utara

Partisipasi	Rata-rata skor	Persentase
Dalam Pengembalian Pinjaman	12,08	80,5%
Menghadiri Pertemuan/Rapat	8,46	56,4%
Rata-rata		68,45%

*Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009 (Data selengkapnya pada Lamp. 2)*

*Keterangan : n = 180 anggota*

Menurunnya persentase partisipasi anggota UPKD dalam mempertahankan keberlangsungan UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara tentunya tidak terlepas dari adanya pengaruh dari faktor-faktor lain. Dalam penelitian ini variabel yang diduga berhubungan dengan tingkat partisipasi anggota UPKD adalah umur, jumlah tanggungan keluarga, konsumsi rumah tangga, pendapatan dan lama menjadi nasabah UPKD. Hasil dari penelitian terhadap variabel yang berhubungan dengan tingkat partisipasi anggota UPKD tersaji pada penjelasan di bawah ini.

### ***Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Anggota UPKD dalam Pengembalian Pinjaman***

Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa lima variabel yang diuji dengan menggunakan rank spearman hanya empat variabel yang berhubungan dengan tingkat partisipasi anggota UPKD dalam pengembalian pinjaman yaitu jumlah tanggungan keluarga, konsumsi rumah tangga, pendapatan dan lama menjadi nasabah UPKD. Sedangkan variabel umur mempunyai hubungan yang tidak nyata karena  $t \text{ hitung } 0,165 < t \text{ tabel } 1,96$  dan ini berarti bahwa tua mudanya umur seseorang tidak berhubungan dengan tingkat pengembalian pinjaman nasabah UPKD.



Tabel 12. Hasil Analisis Rank Spearman Terhadap variabel yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Anggota UPKD di Bengkulu Utara dalam pengembalian pinjaman

Variabel	rs	t hitung	t tabel
Umur	0.012281	0.164874	1.96
Jumlah Tanggungan Keluarga	0.138751	1.994722*	1.96
Konsumsi Rumah Tangga	0.176752	2.599015*	1.96
Pendapatan	0.174094	2.555804*	1.96
Lama menjadi nasabah UPKD	0.247581	3.808005*	1.96

Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009 (Data selengkapnya pada Lamp. 3)

\*) = berhubungan nyata dengan variabel terikat pada  $\alpha = 5\%$

N = 180

Variabel jumlah tanggungan keluarga memperoleh nilai t hitung 1,995 > t tabel 1,96 dengan  $\alpha = 5\%$  ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima atau  $H_o$  ditolak yang berarti bahwa terdapat hubungan yang nyata antara jumlah tanggungan keluarga dengan tingkat partisipasi anggota dalam pengembalian pinjaman UPKD. Apabila jumlah tanggungan keluarga semakin banyak maka akan semakin meningkatkan kinerja nasabah dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan hal ini juga akan meningkatkan pengembalian pinjaman nasabah karena keberadaan UPKD sebagai lembaga keuangan desa yang menyediakan pinjaman untuk modal usaha bagi nasabah.

Variabel konsumsi rumah tangga memperoleh nilai t hitung 2,599 > t tabel 1,96 dengan  $\alpha = 5\%$  ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima yang berarti bahwa terdapat hubungan yang nyata antara konsumsi rumah tangga dengan tingkat partisipasi anggota dalam pengembalian pinjaman UPKD. Semakin tinggi konsumsi rumah tangga anggota UPKD maka akan semakin mendorong nasabah untuk bekerja lebih giat lagi untuk memenuhi biaya konsumsi rumah tangganya dan hal ini juga akan meningkatkan pengembalian pinjaman nasabah karena tersedianya pendapatan yang cukup untuk membayar pinjaman UPKD.

Variabel pendapatan memperoleh nilai t hitung 2.556 > t tabel 1,96 dengan  $\alpha = 5\%$  ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima atau  $H_o$  ditolak yang berarti bahwa terdapat hubungan yang nyata antara pendapatan keluarga dengan tingkat partisipasi anggota dalam pengembalian pinjaman UPKD. Apabila pendapatan keluarga semakin tinggi maka

akan semakin memudahkan nasabah untuk membayar pinjaman UPKD secara langsung hal ini akan meningkatkan tingkat partisipasi pengembalian pinjaman nasabah UPKD.

Variabel lamanya menjadi nasabah memperoleh nilai  $t$  hitung  $3.808 > t$  tabel  $1,96$  dengan  $\alpha = 5\%$  ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima yang berarti bahwa terdapat hubungan yang nyata antara lamanya menjadi nasabah dengan tingkat partisipasi anggota dalam pengembalian pinjaman UPKD. Semakin lama menjadi nasabah UPKD maka akan semakin tinggi kesadaran untuk membayar pinjaman UPKD dan hal itu akan meningkatkan tingkat partisipasi pengembalian pinjaman UPKD.

### ***Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Anggota UPKD dalam Menghadiri Pertemuan/Rapat***

Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa lima variabel yang diuji dengan menggunakan rank spearman hanya empat variabel yang berhubungan dengan tingkat partisipasi anggota UPKD dalam menghadiri pertemuan/rapat yaitu umur, konsumsi rumah tangga, pendapatan dan lama menjadi nasabah UPKD. Sedangkan variabel Jumlah tanggungan keluarga mempunyai hubungan yang tidak nyata karena  $t$  hitung  $1.8639 < t$  tabel  $1,96$  dan ini berarti bahwa banyak atau sedikitnya jumlah tanggungan keluarga tidak berhubungan dengan tingkat partisipasi anggota UPKD untuk menghadiri pertemuan/ rapat.

Tabel 13. Hasil Analisis Rank Spearman Terhadap variabel yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Anggota UPKD di Bengkulu Utara dalam menghadiri pertemuan / rapat

Variabel	rs	t hitung	t tabel
Umur	-0.0587097	-0.761257204	1.96
Jumlah Tanggungan Keluarga	0.130287	1.863907	1.96
Konsumsi Rumah Tangga	0.292346	4.636562*	1.96
Pendapatan	0.388833	6.635804*	1.96
Lama menjadi nasabah UPKD	0.191204	2.836524*	1.96

Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009 (Data selengkapnya pada Lamp.4)

\*) = berhubungan nyata dengan variabel terikat pada  $\alpha = 5\%$

$N = 180$

Variabel umur memperoleh nilai  $t$  hitung  $-0.761 > t$  tabel  $-1,96$  dengan  $\alpha = 5\%$  ini menunjukkan bahwa  $H_o$  diterima atau  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata antara umur dengan tingkat partisipasi anggota dalam menghadiri

pertemuan/rapat UPKD. Tua dan muda umur nasabah tidak berhubungan terhadap kesadaran anggota UPKD untuk menghadiri pertemuan/rapat sehingga hal ini tidak berhubungan terhadap tingkat partisipasi anggota UPKD dalam menghadiri pertemuan/rapat UPKD.

Variabel konsumsi rumah tangga memperoleh nilai  $t$  hitung  $4.637 > t$  tabel  $1,96$  dengan  $\alpha = 5\%$  ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima yang berarti bahwa terdapat hubungan yang nyata antara konsumsi rumah tangga dengan tingkat partisipasi anggota dalam menghadiri pertemuan/rapat UPKD. Semakin tinggi konsumsi rumah tangga anggota UPKD maka akan semakin mendorong nasabah untuk aktif dalam menghadiri pertemuan/rapat yang dilakukan oleh UPKD agar mengetahui informasi terbaru dari UPKD.

Variabel pendapatan memperoleh nilai  $t$  hitung  $6.636 > t$  tabel  $1,96$  dengan  $\alpha = 5\%$  ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima atau  $H_o$  ditolak yang berarti bahwa terdapat hubungan yang nyata antara pendapatan keluarga dengan tingkat partisipasi anggota dalam menghadiri pertemuan/rapat UPKD. Apabila pendapatan keluarga semakin tinggi maka akan meningkatkan kesadaran warga dalam menghadiri pertemuan/rapat UPKD agar terus menjaga keberlangsungan UPKD.

Variabel lamanya menjadi nasabah memperoleh nilai  $t$  hitung  $2.837 > t$  tabel  $1,96$  dengan  $\alpha = 5\%$  ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima yang berarti bahwa terdapat hubungan yang nyata antara lamanya menjadi nasabah dengan tingkat partisipasi anggota dalam menghadiri pertemuan/rapat UPKD. Semakin lama menjadi nasabah UPKD maka akan semakin tinggi kesadaran untuk menghadiri pertemuan/rapat UPKD karena telah memiliki rasa ingin mempertahankan keberlangsungan UPKD dan hal itu akan meningkatkan tingkat partisipasi anggota dalam menghadiri pertemuan/rapat yang diadakan oleh UPKD.

### **5.3. Tingkat Pengembalian Kredit dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya**

Lembaga keuangan mikro seperti UPKD memerlukan tingkat pengembalian dari nasabah yang lancar dan tinggi. Tingkat pengembalian yang tinggi diperlukan mengingat UPKD mengelola dana bergulir (*revolving fund*). Perguliran dana kepada nasabah sangat tergantung kepada tingkat pengembalian yang sedang berjalan sehingga pengurus UPKD

berupaya seoptimal mungkin untuk menghindari penunggakan. Terlebih lagi, dalam setiap pengembalian nasabah disertai dengan bunga pinjaman yang sebagian dari pendapatan bunga dialokasikan untuk operasional UPKD.

Secara umum, rata-rata tingkat pengembalian nasabah UPKD sebesar 53,15% dengan kisaran tingkat pengembalian antara 0,59 % - 100 %. Klasifikasi tingkat pengembalian nasabah UPKD disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 14. Tingkat Pengembalian Nasabah UPKD

No	Kategori Pengembalian	Tingkat Pengembalian (%)	Jumlah	
			orang	%-tase (%)
1	Rendah	0,59 - 33,73	48	26,67
2	Sedang	33,74 - 66,86	64	35,56
3	Tinggi	66,87 - 100	68	37,77
Jumlah / Rata-rata		53,15	180	100

*Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009*

Tingkat pengembalian nasabah dikategorikan cukup tinggi dengan tingkat pengembalian di atas 33,74 % mencapai 73,33 % dari jumlah responden. Bahkan ada 16 orang responden memiliki tingkat pengembalian di atas 90 %, dan lima orang di antaranya memiliki tingkat pengembalian 100 %. Tentu, nasabah UPKD dengan tingkat pengembalian kategori rendah perlu mendapat perhatian khusus dari pengurus UPKD dan aparat desa.

Tingkat pengembalian nasabah UPKD ini di duga dapat dipengaruhi oleh lima variabel utama. Untuk menguji pengaruh lima variabel tersebut terhadap tingkat pengembalian, maka perlu dilakukan uji F dan uji t yang dilakukan dengan model analisis regresi liner berganda. Pada analisis ini, variabel dependen (Y) adalah tingkat pengembalian nasabah dalam satuan persen, sedangkan variabel independen (X) adalah X1 (umur responden dalam satuan tahun), X2 (jumlah tanggungan keluarga dalam satuan orang), X3 (konsumsi rumah tangga dalam satuan rupiah per bulan), X4 (pendapatan rumah tangga dalam satuan rupiah per bulan) dan X5 (lama menjadi nasabah dalam satuan tahun). Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Nasabah UPKD

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>				
R Square	0.527107			
Observations	174			

<i>ANOVA</i>				
	<i>df</i>	<i>F hitung</i>	<i>F tabel</i>	
Regression	5	4.8927	2.2679	
Residual	168			
Total	173			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>t tabel</i>
Intercept	-9.3419	2.1640	-4.3169	1.9738
Umur	0.0095	0.2657	0.0358	
Jumlah Tanggungan Keluarga	-0.2902	0.1724	-1.6832	
Konsumsi Rumah Tangga	0.5344	0.1739	3.0724	
Pendapatan Rumah Tangga	0.1364	0.0675	2.0213	
Lama menjadi Nasabah	-0.2286	0.1166	-1.9605	

*Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009*

Model atau persamaan regresi yang dapat disusun berdasarkan hasil analisis adalah :

$$Y = - 9,34 \text{ 19} + 0,0095 \text{ X1} - 0,2902 \text{ X2} + 0.5344 \text{ X3} + 0,1364 \text{ X4} - 0,2286 \text{ X5}$$

Hasil analisis seperti disajikan pada tabel di atas menjelaskan keterhandalan model yang disusun, yaitu keterhandalan variabel-variabel independen (variabel-variabel X) menjelaskan variabel dependen (variabel Y). Keterhandalan tersebut ditunjukkan oleh nilai R square atau yang sering disebut dengan koefisien determinasi, dimana pada model penelitian ini kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 52,71% dan sekitar 47,29% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Secara bersama-sama, variabel-variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pengembalian. Pengaruh ini ditunjukkan oleh nilai *F hitung* sebesar

4,8927, yang lebih besar dari nilai *F tabel* yang hanya sebesar 2,2679 pada taraf kepercayaan 95 % ( $\alpha = 0.05$ ). Meskipun demikian, belum tentu setiap variabel independen yang dimasukkan dalam model secara parsial akan memberikan pengaruh secara nyata terhadap tingkat pengembalian. Untuk itu, perlu dilakukan *uji t*.

Hasil uji menunjukkan bahwa secara parsial hanya ada dua variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pengembalian pada taraf kepercayaan 95%. Dua variabel tersebut adalah X3 (konsumsi rumah tangga dalam satuan rupiah per bulan) dan X4 (pendapatan rumah tangga dalam satuan rupiah per bulan).

Variabel konsumsi rumah tangga memiliki nilai *t hitung* sebesar 3,0274, dimana nilai ini lebih besar dari nilai *t tabel* yang hanya sebesar 1,9738. Koefisien dari variabel ini adalah 0,5344, yang berarti setiap peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp 1 per bulan maka akan meningkatkan persentase pengembalian sebesar 0,53 %. Rata-rata konsumsi rumah tangga responden per bulan sebesar Rp 676.128 dengan kisaran konsumsi antara Rp 234.000 per bulan hingga 2.090.000 per bulan.

Variabel pendapatan rumah tangga memiliki nilai *t hitung* sebesar 2,0213, dimana nilai ini lebih besar dari nilai *t tabel* yang hanya sebesar 1,9738. Koefisien dari variabel ini adalah 0,1364, yang berarti setiap pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1 per bulan maka akan meningkatkan persentase pengembalian sebesar 0,1364 %, dimana rata-rata pendapatan rumah tangga responden sebesar Rp 1.935.162 per bulan.

#### **5.4. Analisis Tingkat Kesehatan UPKD**

Untuk melihat adanya pengaruh dari selesainya pendampingan oleh BRDP terhadap UPKD maka dalam penelitian ini menggunakan indikator pengukuran yang sama seperti saat BRDP melakukan pengukuran tingkat kesehatan UPKD. Dengan menggunakan tiga indikator yang mempunyai total 34 pertanyaan maka setelah BRDP usai diperoleh data yang dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 . Hasil Analisis Indikator untuk mengukur Tingkat Kesehatan UPKD

No	Nama UPKD	Indikator Organisasi	Indikator Pengelolaan Dana dan Pinjaman	Indikator Administrasi Keuangan
		Persentase	Persentase	Persentase
1	Bina Usaha	73.64%	40.91%	73.33%
2	Selolong Makmur	50.91%	36.82%	86.67%
3	Tunas Subur	57.27%	48.64%	60.00%
4	Ginde Sakti	63.64%	48.64%	60.00%
5	Harapan Maju	63.64%	47.73%	93.33%
6	Bina Mandiri	63.64%	46.36%	80.00%
<b>Rata-Rata</b>		<b>62.12%</b>	<b>44.85%</b>	<b>75.56%</b>

*Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009 (Data selengkapnya pada Lamp. 5)*

*Keterangan : n = 180 anggota*

Pada indikator organisasi dapat dijelaskan bahwa setelah BRDP selesai rata-rata indikator organisasi 62,12 persen angka ini cukup tinggi. Menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh BRDP cukup berhasil. UPKD Bina Usaha mendapatkan persentase tertinggi yaitu 73,64 persen yang berarti bahwa pengetahuan pengurus dalam menjalankan organisasi UPKD seperti menentukan perangkat organisasi UPKD, kesesuaian fungsi yang dijalankan oleh pengurus dan kelengkapan organisasi lainnya dipahami oleh pengurus UPKD tersebut walaupun sudah tidak ada lagi pendampingan seperti saat proyek BRDP berlangsung.

Indikator pengelolaan dana dan pinjaman menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun proposal permohonan pinjaman anggota kepada UPKD dan bagaimana kemampuan UPKD dalam mengelola modal yang ada pada UPKD. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh persentase rata-rata sebesar 44,85 persen yang berarti rendah dan hal ini menunjukkan bahwa setelah proyek BRDP selesai, pengelolaan dana dan pinjaman mengalami penurunan, karena pada saat proyek BRDP berlangsung UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara rata-rata mempunyai persentase lebih dari 90 persen, karena apabila tidak mencapai angka tersebut UPKD tidak akan mendapatkan tambahan modal yang mencapai angka maksimal sebesar 200 juta rupiah. Akan tetapi setelah UPKD berakhir banyak UPKD yang tidak lagi mampu mengelola keuangan UPKD, masalah yang biasanya dihadapi oleh pengurus UPKD adalah adanya pemahaman yang keliru oleh masyarakat atau nasabah UPKD yang berkeyakinan bahwa

dana yang berasal dari BRDP adalah hibah atau hadiah yang tidak akan dikembalikan oleh UPKD kepada BRDP lagi. Sehingga, ada sebagian masyarakat yang tidak membayar pinjaman UPKD sesuai jadwal yang telah ditentukan dan akibatnya modal UPKD tidak bertambah bahkan berkurang.

Sedangkan untuk indikator administrasi keuangan masih mempunyai persentase yang tinggi yaitu 75,56 persen walaupun BRDP telah selesai. Hal ini berarti bahwa pengurus UPKD masih menerapkan ketentuan administrasi yang mereka dapatkan pada saat proyek BRDP masih berlangsung seperti pencatatan kas dan pinjaman yang dikeluarkan oleh UPKD.

Tabel 17. Hasil Analisis Tingkat Kesehatan UPKD Setelah Proyek BRDP

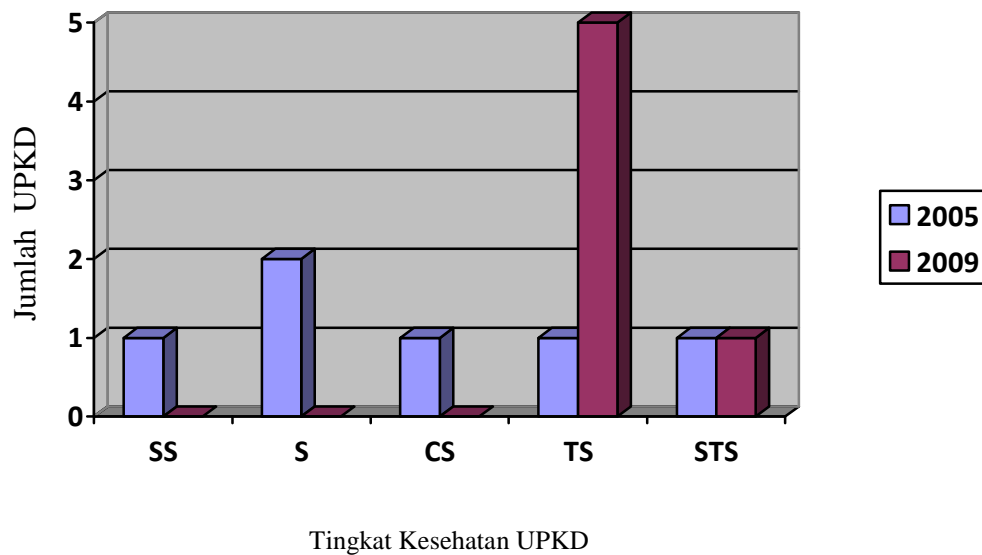
No	Nama UPKD	Tingkat Kesehatan UPKD	
		2005	2009
1	Bina Usaha	Sehat	Tidak Sehat
2	Selolong Makmur	Cukup Sehat	Sangat Tidak Sehat
3	Tunas Subur	Sehat	Tidak Sehat
4	Ginde Sakti	Sangat Tidak Sehat	Tidak Sehat
5	Harapan Maju	Tidak Sehat	Tidak Sehat
6	Bina Mandiri	Sangat Sehat	Tidak Sehat

*Sumber : Hasil pengolahan data responden, 2009 (Data selengkapnya pada Lamp. 5)*

Setelah dilakukannya pengukuran tingkat kesehatan UPKD dengan menggunakan indikator pada Tabel 16 akan dapat dilihat juga tingkat kesehatan UPKD setelah proyek BRDP yang tersedia pada Tabel 17. UPKD Bina Mandiri merupakan UPKD yang mengalami perubahan tingkat kesehatan yang signifikan karena pada saat BRDP selesai UPKD ini berada pada tingkat sangat sehat namun saat dilakukan survai UPKD ini mendapatkan hasil tidak sehat. Dilihat dari hasil persentase indikator pengukuran yang diambil terlihat bahwa UPKD Bina Mandiri mempunyai masalah pada pengelolaan dana dan pinjaman. Keadaan ini lebih menegaskan bahwa UPKD masih membutuhkan pendampingan seperti pada saat proyek BRDP berlangsung.

Secara umum dapat disimpulkan pengukuran tingkat kesehatan UPKD setelah proyek BRDP selesai dapat dilihat pada grafik di bawah ini :





**Gambar 1. Grafik Perbandingan Tingkat Kesehatan Kelembagaan UPKD saat BRDP selesai (2005) dan Setelah Proyek BRDP (2009)**

Pada gambar grafik di atas terlihat jelas bahwa telah berakhirnya proyek BRDP membawa pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan UPKD di Kabupaten Bengkulu Utara. Tiga tingkat kesehatan yaitu Sangat Sehat (SS), Sehat (S), dan Cukup Sehat (CS) sama sekali tidak ada UPKD atau bernilai 0 setelah proyek BRDP usai sedangkan pada tingkat Tidak Sehat (TS) mengalami peningkatan yaitu dari 1 UPKD menjadi 5 UPKD setelah proyek BRDP usai. Sedangkan untuk tingkat Sangat Tidak Sehat (STS) jumlahnya tetap yaitu satu UPKD. Berdasarkan keadaan di atas dapat disimpulkan bahwa UPKD masih membutuhkan pendampingan seperti yang di peroleh saat proyek BRDP masih berlangsung.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Secara umum tingkat partisipasi anggota dalam mempertahankan keberlangsungan UPKD secara rata-rata adalah 68,45 %, yang terdiri dari partisipasi dalam pengembalian pinjaman yang masih tinggi yaitu sebesar 80,5 % dan partisipasi anggota dalam menghadiri pertemuan / rapat yang tergolong rendah yaitu hanya 56,4 %. Partisipasi dalam pengembalian pinjaman berhubungan dengan jumlah tanggungan keluarga, konsumsi rumah tangga, pendapatan dan lama menjadi nasabah UPKD. Sedangkan partisipasi dalam menghadiri pertemuan / rapat berhubungan dengan konsumsi rumah tangga, pendapatan dan lama menjadi nasabah UPKD.
2. Rata-rata tingkat pengembalian nasabah UPKD sebesar 53,15% dengan kisaran tingkat pengembalian antara 0,59 % - 100 %. Tingkat pengembalian ini dipengaruhi konsumsi rumah tangga, dimana peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp 1 per bulan akan meningkatkan persentase pengembalian sebesar 0,53 % dan pendapatan rumah tangga, dimana peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1 per bulan akan meningkatkan persentase pengembalian sebesar 0,1364 %.
3. Tingkat kesehatan UPKD yang pada saat BRDP berakhir berada dalam kategori *sangat sehat, sehat, tidak sehat* dan *sangat tidak sehat* pada saat ini berada dalam kategori *tidak sehat*, dan UPKD yang pada saat BRDP berakhir berada dalam kategori *cukup sehat* pada saat ini berada dalam kategori *sangat tidak sehat*. Umumnya pengelolaan UPKD masih cukup bagus dari aspek organisasi dan administrasi keuangan, tetapi tidak bagus dalam pengelolaan dana dan pinjaman.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka beberapa hal yang dapat disarankan adalah :

1. Pengurus lembaga keuangan mikro perlu melakukan verifikasi secara cermat terhadap calon nasabah dan nasabah dengan konsumsi rumah tangga dan pendapatan rumah tangga yang relatif lebih baik dapat diprioritaskan untuk memperoleh pinjaman.
2. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk mendampingi pengurus UPKD dalam mengelola lembaga dan aset UPKD, dimana pendampingan yang dapat diberikan adalah seperti pendampingan yang pernah diberikan selama proyek BRDP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2002. *Buku Kerja Bengkulu Regional Development Project (BRDP)* Bengkulu Utara.
- Augusta, I. 2000. *Asumsi-asumsi Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Indonesia*. Mimbar SOSEK 13 (1) :19 – 28 April 2000.
- \_\_\_\_\_.2003. *Metode Evaluasi Program Pemberdayaan (Evaluation Methods on Empowerment Programe)*. Mimbar SOSEK 16 (1): 93 – 116, April 2003.
- Bappeda Propinsi Bengkulu & LSM Teraju, 2003. *Studi Evaluasi dan Pengembangan BRDP Propinsi Bengkulu*. Bengkulu
- Bappeda Propinsi Bengkulu & P3KPK, 2003. *Studi Beneficiary Survei Desa Tahap III BRDP*. BRDP Propinsi Bengkulu. Bengkulu
- Bina Swadaya, 2005. *Program Kegiatan Desa UPKD Propinsi Bengkulu*. BRDP Propinsi Bengkulu. Bengkulu
- Judge, G.G., W.E. griffits, RC. Hill, H. Lutkepohl dan T.c. Lee. 1985. *The Theory and Practice of Econometrics. 2<sup>nd</sup> edition*. John Willey. New York.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-5. Ghalia Indonesia.. Jakarta
- Nusril *et al.* 2003.*Studi Evaluasi Pelaksanaan dan Kelembagaan Pelaksana Program Bengkulu Regional Development Project (BRDP)*. AGRISEP Vol. 3 No. 2, Maret 2005 : 114 – 126
- O'Donnell. C.J.; A. Smith dan J. Modison. 1999. *Using Individual Attributes to Explin Variations in The Incidence of Violence Against Women*. Draft. The University of New England. Armidale. NSW.
- Salandro, D. dan W.B. Harrison. 1997. Determinants of the Demand for home equity credit lines. *The Journal of Consumer Affairs*. 31(2): 326-345.
- Singarimbun, M dan Sofian E.1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES Jakartra.
- Sumodinigrat, G.1999. *Penanggulangan Krisis Harus Memihak Rakyat*. Majalah Triwulanan Perencanaan Pembangunan 16 Juni/Juli 1999. BAPPENAS. Jakarta.
- Sukiyono, K Musriyadi Nabiu, 2004. *Metode Monitoring dan Evaluasi : Diskusi*. Jurnal Agrisep 2 (2) : 157 – 163, Maret 2004.
- Wahyuni, S.E, Nuraini P, dan Yuliaty R.2003. *Kajian Tentang Program-Program Pelayanan Lanjut Usia di Pedesaan di Indonesia*. Mimbar SOSEK 16 (1) : 1 – 20, April 2003 .
- Yuliarso,M.Z dan Indra Cahyadinata.2003. *Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan terhadap Kegiatan Bengkulu Regional Development Project (BRDP)*. Jurnal Agrisep 1 (2), : 137 – 143, Maret 2003.